



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Nomor : W13.U5/97/OT01.3/I/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Daerah

Bantul, 4 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13.U/289/ST/KPT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, tentang Melakukan Pengawasan Daerah di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu dan Kamis, 26 - 27 Oktober 2022 (dokumen terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB



AMINUDDIN, S.H., M.H



**LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN DAERAH
PERIODE JULI S.D DESEMBER 2022**

Pengadilan Negeri Bantul

Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, kekuatan lahir batin serta perlindungan-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada kami,

Sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan meskipun kami telah bekerja keras untuk melakukan yang terbaik. Kiranya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah Periode Juli sampai dengan Desember 2022 yang disusun secara sederhana ini dapat digunakan sebagai gambaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sehingga mungkin dapat dijadikan acuan dalam mengambil acuan dalam mengambil kebijakan pada periode waktu selanjutnya guna mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan.

Terima kasih atas peran, dukungan dan kerjasama seluruh unsur sehingga dapat mencapai target kinerja dengan baik. Kami berharap pada semua pihak untuk turut andil dalam mempertahankan kebiasaan yang baik yang telah menjadi budaya kerja selama ini serta dapat selalu meningkatkan kinerja.

Terakhir, semoga Laporan Tindak Lanjut Pengawasan Daerah Periode Januari sampai dengan Desember 2022 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Dan semoga kerja keras yang kita lakukan akan menjadi amal sholeh dihadapan Allah SWT. Aamiinn

Bantul 4 Januari 2023
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	
Surat Tugas Tim Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
Temuan Tim Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah Pengadilan Negeri Bantul	
Lampiran-lampiran	



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396 412, Fax. (0274) 4396 415
Website : www.pt-yogyakarta.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : W13-U/209 /ST/KPT/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.
NIP : 19580401 198403 1 004
Pangkat /Gol. Ruang : Pembina Utama - (IV/e)
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Dengan ini menugaskan kepada :

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Agus Sutarno, S.H.,M.H.	195608261980011001	Ketua
2.	Floriberta Setyowati, S.H.,M.H.	196104231981032002	Anggota
3.	Jaka Muhamat Nurhasan, S.H.,M.H.	196803041989031003	Anggota
4.	Sunardi, S.H.,M.H.	196905191993031002	Sekretaris
5.	Iswanto	-	Pengemudi

Untuk : Melakukan pengawasan daerah di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu dan Kamis, 26-27 Oktober 2022.

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Yogyakarta, 20 Oktober 2022

KETUA

Dr. Setyawan Hartono, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Petugas Presensi Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
3. Bendahara Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

II.3. ADMINISTRASI PERKARA

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan daerah di Pengadilan Negeri Bantul yang dilaksanakan tanggal 26 dan 27 Oktober 2022, TIM Hatiwasda menemukan hal-hal sebagai berikut:

II.3.1. PERDATA

II.3.1.1. Eksekusi

Kondisi

Terdapat 28 perkara eksekusi yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu:

No	Nomor Perkara	Tahapan Terakhir	Ket
1	11/Pdt.Eks/2017/PN Btl Jo. 62/PDT.G/2015/PN Btl	Pelaksanaan teguran tgl. 13-05-2012	Ada gugatan
2	2/Eks.HT/2019/ PN Btl	Pelaksanaan sita eksekusi tgl. 28-11- 2019	
3	2/Eks/2022/ PN Btl Jo. 341 PK/Pdt/2019 Jo. 2417 K/ Pdt/2012 Jo. 68/PDT/2011/ PTY Jo. 14/Pdt.G/2010/ PN Btl	Pelaksanaan teguran tgl. 04-07-2022	
4	23/Pdt.Eks.HT/2021/PN Btl	Pelaksanaan sita eksekusi tgl. 10-02- 2022,14-02-2022	
5	15/Eks.HT/2018/PN Btl	Pelaksanaan Teguran tgl. 03-07-2018	
6	2/Eks.HT/2019/PN Btl	Tanggal sita eksekusi tgl. 29-11-2019	
7	8/Eks/2020/ PN Btl Jo. 89/Pdt.G/2019/ PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 31-03-2021	Lelang ulang
8	9/Eks/2020/ PN Btl Jo. 41/Pdt.G/2019/ PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 30-03-2021	
9	12/Eks.HT/2019/PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 01-12-2020	
10	13/Eks.HT/2019/PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 10-03-2021	
11	8/Pdt.Eks.HT/2016/PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 01-12-2020	Lelang tidak laku
12	6/Pdt.Eks.HT/2021/PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 27-09-2022	
13	10/Pdt.Eks.HT/2021/PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 16-08-2022	
14	5/Eks.HT/2018/PN Btl	Pelaksanaan eksekusi lelang tgl. 29-07-2020	

15	12/Pdt.Eks/2021/ PN Btl Jo. 36/Pdt.G/ 2019/PN Btl	Pelaksanaan teguran tgl. 04-10-2021	Aanmaning
16	1/Eks/2022/ PN Btl Jo. 84/Pdt.G/2021/ PN Btl	Pelaksanaan teguran tgl. 02-06-2022 27-06-2022 04-07-2022	
17	2/Pdt.Eks.HT/2022/PN Btl	Pelaksanaan teguran tgl.14-07-2022	
18	4/Pdt.Eks.HT/2022/PN Btl	Tanggal penetapan sita 22-09-2022	Proses sita
19	5/Pdt.Eks.HT/2022/PN Btl	Tanggal pelaksanaan teguran 15-09-2022	
20	3/Pdt.Eks.HT/2021/PN Btl	Penetapan eksekusi lelang tgl. 08-06-2021	Proses lelang
21	9/Pdt.Eks.HT/2021/PN Btl	Tanggal sita eksekusi 12-01-2022	
22	1/Pdt.Eks.HT/2022/PN Btl	Tanggal sita eksekusi 07-09-2022	Sita
23	3/Pdt.Eks.HT/2022/PN Btl	Tanggal sita eksekusi 28-09-2022	
24	7/Eks.HT/2020/PN Btl	Penetapan eksekusi lelang tgl. 15-10-2020	Ada perlawanan
25	18/Pdt.Eks.HT/2016/PN Btl	Penetapan eksekusi lelang tgl.17-03-2020	Ada sita pidana
26	3/Pdt.Eks/2022/ PN Btl Jo. 46/Pdt.G/ 2019/PN Btl	Pelaksanaan Teguran tg. 26-09-2022	Panggil aanmaning
27	4/Pdt.Eks/2022/ PN Btl Jo. 7/Pdt.G/ 2022/PN Btl	Pelaksanaan Teguran tgl. 19-09-2022 28-09-2022	Proses aanmaning
28	12/Pdt.Eks.HT/2020/PN Btl	Tanggal pelaksanaan Teguran 30-09-2020	Proses dicabut

Kriteria

1. Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Peradilan Khusus.
2. SK WKMA Y/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
3. Buku Pedoman Dirjen Badilum MARI, Februari 2019.

Sebab

Proses terakhir/permasalahan yang terjadi sebagaimana tersebut pada kolom keterangan di atas.

Akibat

Pelaksanaan eksekusi masih berlanjut dan pada saat ini masih dalam proses.

Rekomendasi

Supaya dilaksanakan sesuai prosedur dan tahapan yang sedang berjalan pada saat itu.

II.3.1.2. Register Eksekusi

Kondisi

Register eksekusi tidak diisi dengan lengkap.

Kriteria

1. Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Peradilan Khusus.
2. SK WKMA Y/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
3. Buku Pedoman Dirjen Badilum MARI, Februari 2019.

Sebab

Jurusita belum/tidak melaporkan secara rinci mengenai pelaksanaan ataupun tahapan eksekusi kepada Panitera Muda Perdata.

Akibat

Historis tahapan pelaksanaan eksekusi tidak dapat dibaca/dilihat pada buku register sehingga tidak dapat diketahui tahapan ataupun penyelesaian eksekusi dimaksud.

Rekomendasi

Buku register eksekusi supaya diisi dengan tertib sesuai tahapan/kegiatan yang dilakukan.

II.3.1.3. Sisa Panjar Perkara

Kondisi

Terdapat sisa panjar perkara belum diambil oleh para pihak

Kriteria

1. Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus.
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkarta, tanggal 13 Juni 2008

Sebab

Para pihak yang mempunyai sisa panjar perkara sudah disurati untuk mengambil sisa panjar perkara tersebut namun yang bersangkutan belum datang.

Akibat

Uang sisa panjar perkara masih berada/tersimpan pada brankas/rekening dan menjadi beban Pengadilan Negeri Bantul.

Rekomendasi

Supaya dilaksanakan sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkarta tersebut.

II.3.1.4. Uang Titipan Pihak Ketiga (*Consignatie*)

Kondisi

Terdapat uang titipan pihak ketiga dengan jumlah Rp. 195.774.700 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) belum tersampaikan kepada penerima dan/atau ahli warisnya

Kriteria

Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus.

Sebab

Penerima uang titipan pihak ketiga sudah meninggal, sedangkan ahli waris banyak dan tidak diketahui alamat ataupun tempat tinggalnya.

Akibat

Uang pihak ketiga tersebut masih berada/tersimpan pada brankas/rekening Pengadilan Negeri Bantul sehingga beban Pengadilan Negeri Bantul.

Rekomendasi

Supaya tetap diusahakan penyelesaian penyerahan uang kepada pihak yang berhak menerimanya.

II.4. ADMINISTRASI UMUM

II.4.1. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

II.4.1.1. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Kondisi

Terdapat beberapa pegawai antara lain, an. Presetyo Sujadi, S.H., dan Suyati belum membuat SKP Tahun 2021 dan/atau tidak di *upload* di SIKEP.

Kriteria

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMA/SK/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 238/SEK/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 808/SEK/KP. 01.2/04/2020, tanggal 21 April 2020 hal Pengelolaan Data Hakim dan Aparatur.

Sebab

Pegawai an. Prasetyo Sujadi, S.H., adalah pegawai pindahan dari Pengadilan Negeri Wonosari yang belum dibuatkan SKP dari PN sebelumnya.

Akibat

E-doc SIKEP PN Bantul tidak lengkap karena sebagian SKP ASN tahun 2021 belum dibuat dan/atau di *upload* di SIKEP.

Rekomendasi

ASN yang belum membuat SKP, khususnya Tahun 2021 agar segera membuat SKP dan mengupload *e-doc* tersebut pada SIKEP yang bersangkutan.

II.4.1.2. Pensiun

Kondisi

Berdasarkan uji petik 2 berkas pensiun an. MARKINEM dan ISTIKA ARDININGSIH bahwa pengajuan usul pensiun dilakukan kurang dari 1 tahun, sebagai berikut:

No.	Nama	Usulan	TMT Pensiun	Keterangan
1	Markinem	27-08-2022	01-04-2022	Usulan dibuat 8 bulan sebelum TMT pensiun
2	Istika Ardiningsih	18-05-2022	01-01-2023	

Kriteria

1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1119/SEK/KP.06/7/ 2019, tanggal 16 Juli 2019 hal Tata Cara Pengajuan Usul Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun BKN dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1080/SEK/KP.06/7/2020, tanggal 13 Juli 2020 hal Publikasi pegawai teknis maupun non teknis yang akan memasuki usia pensiun pada Menu Monitoring Pensiun SIKEP Mahkamah Agung RI.

Sebab

Pengajuan usul pensiun yang bersangkutan menunggu sosialisasi SKP baru dari Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Akibat

Pengajuan usul pensiun kurang dari 1 tahun dikuatirkan SK pensiun yang bersangkutan terlambat.

Rekomendasi

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1119/SEK/KP.06/7/2019 membedakan usulan pensiun untuk golongan **IV/b ke bawah** dan **golongan IV/b ke atas**. Pensiun untuk golongan **IV/b ke bawah** diusulkan ke Kanreg BKN I Yogyakarta melalui Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan teknis (Pertek) pensiun. Selanjutnya pertek pensiun tersebut dikirimkan ke Sekretaris Mahkamah Mahkamah guna untuk diterbitkan SK Pensiun. Adapun pensiun untuk golongan **IV/b ke atas** diusulkan ke BKN Pusat oleh Sekretaris Mahkamah Agung/Dirjen Badilum MARI melalui Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Oleh karena proses usulan pensiun tersebut melalui birokrasi yang panjang dan untuk

menghindari keterlambatan penerbitan SK Pensiun maka direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Berkas usulan pensiun sudah dikirimkan oleh Pengadilan Pengaju dan diterima di Pengadilan Tinggi Yogyakarta minimal 15 bulan sebelum TMT Batas Usia Pensiun (BUP) ataupun TMT Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS);
- b. Supaya dibuat kendali pensiun yang antara lain memuat, TMT pensiun dan waktu usulan pensiun sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1119/SEK/KP.06/7/2019, tanggal 16 Juli 2019.

II.4.2. UMUM DAN KEUANGAN

II.4.2.1. Perpustakaan

Kondisi

Sebagian koleksi buku lama di perpustakaan belum ditempel label.

Kriteria

Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan

Sebab

Tidak ada pegawai yang khusus untuk mengelola perpustakaan.

Akibat

Buku tidak dapat dicari melalui aplikasi perpustakaan Pengadilan Negeri Bantul Bantul (Senayan Meranti) karena belum ada pengkodean dalam buku dimaksud.

Rekomendasi

Buku yang belum ada labelnya supaya diberikan label untuk memudahkan pencarian buku di Aplikasi Senayan Meranti.



**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGAWASAN DAERAH**

Nomor **TAPM.F.TC.03-05**

Revisi **01**

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMENT (LKA)

Tanggal **05-09-2017**

Jalan Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo,
Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187

Halaman **3 of 5**

LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA) PENGADILAN NEGERI BANTUL			
Berdasarkan Laporan Assessment	LOKASI PROSES	Kepaniteraan	No. LKA 01
	STANDARD	Indonesia Court Performance Excellence	Kriteria 2,3,4,5,6 dan 7
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :		
	Terdapat 28 perkara eksekusi yang masih dalam proses penyelesaian		
	KATEGORI	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor	Temuan diselesaikan sebelum tanggal
	ASSESSOR	AS, FS, JMN, S	-
Diisi Oleh Pengadilan	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN		
	Proses terakhir/ permasalahan yang terjadi karena masih ada gugatan dan lelang ulang karena tidak laku.		
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN		
	Telah bersurat kepada pemohon eksekusi untuk segera menyelesaikan administrasi untuk proses lelang ulang. Dan untuk berkas yang sedang ada gugatan menunggu putusan.		
	TINDAKAN PENCEGAHAN		
	Telah dilakukan monev setiap bulan komunikasi antara Panitera Muda Perdata dengan Jurusita untuk membahas permasalahan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi maupun Ditjen Badilum melalui aplikasi SIPP yang terkoneksi dengan PERKUSI.		
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	5 Desember 2022	
	PERWAKILAN PENGADILAN	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	

EVIDENCE TINDAKLANJUT TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA)

1. Money Eksekusi

LAPORAN PERKARA PERDATA YANG DEMUHKAN EKSEKUSI
PENGADILAN NEGERI BANTUL
BULAN DESEMBER 2022
LAPORAN EKSEKUSI DARI PUTUSAN

No	NO/RIK PERKARA EKSEKUSI Sesuai Daftar	PIHAK	PERMOHONAN EKSEKUSI	PUTUSAN TUNJANGAN	PELAKSANAAN TUNJANGAN	PENYATAAN MELAKUKAKAN	PELAKSANAAN DARI EKSEKUSI	PUTUSAN DASARNYA LELENG	PUTUSAN DASARNYA BILANG	PELAKSANAAN EKSEKUSI LELENG	PUTUSAN MUS. BILANG	PELAKSANAAN EKSEKUSI BILANG	PUTUSAN MUS. BILANG	PELAKSANAAN EKSEKUSI BILANG	PUTUSAN MUS. BILANG	KETERANGAN	DIKAMPUS/RIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	11/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	Bank Bumi Daya dan S. RUMONGSA	24/11/2021	21/12/2021	17/11/2021	-	25/09/2022									Sudah menyetor uang pokok pelaksanaan	Tidak ada
2	17/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	02/07/2017	21/12/2017	17/11/2017	-	08/02/2018									Tidak ada	
3	18/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	
4	19/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	
5	20/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	
6	21/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	
7	22/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	
8	23/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	
9	24/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	
10	25/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. METERAN	07/09/2013	12/12/2013	20/11/2013	-	-									Tidak ada	

11	11/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	18/11/2022													Proses Eksekusi	
----	--------------------------------------	-----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

LAPORAN PERMOHONAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

No	NO/RIK PERKARA EKSEKUSI Sesuai Daftar	PIHAK	PENYATAAN PERMOHONAN	TANGGAL PUTUSAN TUNJANGAN	TANGGAL PELAKSANAAN TUNJANGAN	TANGGAL DASARNYA LELENG	TANGGAL DASARNYA BILANG	PUTUSAN DASARNYA LELENG	PUTUSAN DASARNYA BILANG	PELAKSANAAN EKSEKUSI LELENG	PUTUSAN MUS. BILANG	PELAKSANAAN EKSEKUSI BILANG	PUTUSAN MUS. BILANG	KETERANGAN	DIKAMPUS/RIK
13	13/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	07/12/2022	21/09/2022	02/12/2022	14/10/2022	17/11/2022	-	11/12/2022				Tidak ada	
14	14/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
15	15/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	07/12/2022	29/12/2022	06/11/2022	20/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
16	16/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
17	17/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
18	18/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
19	19/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
20	20/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
21	21/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
22	22/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
23	23/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
24	24/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
25	25/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
26	26/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
27	27/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	
28	28/162/2022/PN/B/2022/1000/PT.03/110	PT. BANK BANTUL	15/11/2022	29/12/2022	13/12/2022	14/11/2022	19/11/2022	17/11/2022						Tidak ada	

1. 2019/144/PT/2022/PN/Bt	PT BPR Ambarkelas Membayar Utang - PT. S&S dtk	14/04/2022	17/04/2022	15/05/2022	16/11/2022	16/11/2022															Proses Sisa
2. 2019/144/PT/2022/PN/Bt	PT BPR Ambarkelas Membayar Utang - PT. S&S dtk	16/11/2022	17/04/2022	16/03/2022	16/11/2022	16/11/2022															Proses Matur
3. 2019/144/PT/2022/PN/Bt	PT BPR Ambarkelas Membayar Utang - PT. S&S dtk	16/11/2022	17/04/2022	16/03/2022	16/11/2022	16/11/2022															Proses Matur

EKSEKUSI YANG SUDAH DILAKSANAKAN DARI BILAN JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

1. 2019/144/PT/2022/PN/Bt	No. 2/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 14/01/2022
2. 22/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 3/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 22/01/2022
3. 16/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 4/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 16/01/2022
4. 16/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 5/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 16/01/2022
5. 16/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 6/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 16/01/2022
6. 23/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 7/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 23/01/2022
7. 25/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 8/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 25/01/2022
8. 17/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 9/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 17/01/2022
9. 16/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 10/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 16/01/2022
10. 16/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 11/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 16/01/2022
11. 16/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 12/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 16/01/2022
12. 12/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 13/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 12/01/2022
13. 12/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 14/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 12/01/2022
14. 10/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 15/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 10/01/2022
15. 10/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 16/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 10/01/2022
16. 16/19/144/PT/2022/PN/Bt	No. 17/144/PT/2022/PN/Bt dan dinyatakan Eksekusi Hak Tanggung 16/01/2022


CATATAN

1. Nota-fian (16/11) juga sudah satu persatu secara dilaksanakannya (16/11) persatu nomor 1/144/PT/2022/PN/Bt.
2. Permohonan Eksekusi nomor 1
3. Berkas telah selesai
4. Nota-fian (11/11) juga sudah satu persatu

Mengertahi
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDIN, S.H., M.H.
NIP. 1966032211996031001

Bantul, 13 Juni 2022
Materi


AMINUDIN, S.H., M.H.
NIP. 1966032211996031001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp Faks : 0274 - 367348. Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Nomor : W13US/ 466/ HK.02 VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut permohonan Eksekusi Hak Tanggungan
Nomor: 8 Pdt.Eks.HI/2021/PN.Bt

Bantul, 13 Juni 2022

Kepada, MR. Evi Dhamayanti, S.E., M.M.
Direktur Utama PT. BPR Ambarkelasung Persada

Menindaklanjuti proses Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang saudara ajukan terhadap Termohon Eksekusi an. Mayori Etania, dkk., berdasarkan Berita Acara Peneguran (Aanmaning) ke-2 Nomor: 8 Pdt.Eks.HI/2021/PN Bt tanggal 7 September 2021 bahwa "Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi belum mencapai kesepakatan maka Para Termohon Eksekusi membuat surat pernyataan dan para pihak akan hadir kembali ke Pengadilan untuk menyampaikan hasil kesepakatan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021".

Bahwa hingga saat ini kami belum menerima hasil kesepakatan dimaksud, baik dari Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksekusi. Untuk itu diminta konfirmasi dari saudara mengenai kelanjutan proses Eksekusi Hak Tanggungan tersebut.

Selanjutnya Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut akan kami anggap selesai dan jurnal keuangan eksekusi akan kami tutup apabila dalam waktu 30 hari sejak surat ini dikirimkan tidak ada jawaban dari saudara selaku Pemohon Eksekusi.

Demikian atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

AMINUDIN, S.H., M.H.
NIP. 1966032211996031001

PT BPR AMBARKELASUNG PERSADA
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55711
Telp/Fax: 0274-367348
www.pn-bantul.go.id

PENGADILAN NEGERI BANTUL
K.L.I.A.


AMINUDIN, S.H., M.H.
NIP. 1966032211996031001

	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA PENGAWASAN DAERAH	Nomor	TAPM.F.TC.03-05	
		Revisi	01	
	LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMENT (LKA)		Tanggal	05-09-2017
	Jalan Prof.Dr.Wirjono Projudikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo, Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187		Halaman	3 of 5

Berdasarkan Laporan Assessment	LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA) PENGADILAN NEGERI BANTUL			
	LOKASI PROSES		Kepaniteraan	No. LKA 01
	STANDARD	Indonesia Court Performance Excellence	Kriteria	2,3,4,5,6 dan 7
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :			
	Register eksekusi tidak diisi dengan lengkap.			
	KATEGORI	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor		Temuan diselesaikan sebelum tanggal
ASSESSOR	AS, FS, JMN, S		-	
Diisi Oleh Pengadilan	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN			
	Jurusita lupa/belum/ tidak melaporkan secara rinci mengenai pelaksanaan ataupun tahapan eksekusi kepada Panitera Muda Perdata.			
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN			
	Setiap menjelang akhir bulan Panitera Muda Perdata memastikan kembali dengan berkomunikasi dengan Jusrita terkait progress eksekusi yang ditangani untuk bahan pelaporan;			
	TINDAKAN PENCEGAHAN			
	Selalu disampaikan dan diingatkan dalam rapat berjenjang Kepaniteraan terkait laporan update progress tahapan eksekusi yang berjalan maupun sudah selesai.			
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	5 Desember 2022		
	PERWAKILAN PENGADILAN	Ketua Pengadilan Negeri Bantul		



**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGAWASAN DAERAH**

Nomor **TAPM.F.TC.03-05**

Revisi **01**

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMENT (LKA)

Tanggal **05-09-2017**

Jalan Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo,
Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187

Halaman **3 of 5**

LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA) PENGADILAN NEGERI BANTUL			
Berdasarkan Laporan Assessment	LOKASI PROSES	Kepaniteraan	No. LKA 01
	STANDARD	Indonesia Court Performance Excellence	Kriteria 2,3,4,5,6 dan 7
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :		
	Terdapat sisa panjar perkara belum diambil oleh para pihak.		
	KATEGORI	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor	Temuan diselesaikan sebelum tanggal
	ASSESSOR	AS, FS, JMN, S	-
Diisi Oleh Pengadilan	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN		
	Para pihak lupa tidak langsung mengambil sisa panjar setelah perkara putus walaupun sudah diingatkan.		
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN		
	Sudah mengirimkan surat untuk segera mengambil sisa panjar kepada para pihak. Agar setiap para pihak saat mengambil salinan penetapan/ putusan harus menunjukkan tanda terima sisa panjar (Kebijakan KPN). Pada saat setelah pembacaan putusan/ penetapan lebih dikomunikasikan perihal pengambilan sisa panjar.		
	TINDAKAN PENCEGAHAN		
	Kepaniteraan Perdata telah mengaktifasi fitur CMS (<i>Cash Management System</i>) bekerjasama dengan Bank BRI sehingga memungkinkan pengembalian sisa panjar dapat langsung dikirim ke rekening pihak.		
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	5 Desember 2022	
	PERWAKILAN PENGADILAN	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	

3. Surat Sisa Panjar



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, SH No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp. Faks. 0274 - 367345. Email: pn-bantul.go.id
[Portal: surat-pn-bantul.go.id](http://portal.surat-pn-bantul.go.id)

Bantul, 19 Desember 2022

Nomor : W13.U.S/4284/HK.02/XII/2022

Lampiran :-

Perihal : Sisa Panjar biaya

Perkara Gugatan

Nomor : 72/Pdt.G/2022/PN Btl

Kepada:

Yth. YUDI TRIAWIBOWO, SH

Kuasa Hukum Dari:

HERRYBERTUS FEBRIANTO MULYA

d/a Plosokuning 2 NG II/31, RT 07/RW 02

Minomartani, Ngaglik, Sleman


Di - SLEMAN

Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa perkara Gugatan yang terdaftar dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PN Btl atas nama saudara, bahwa masih ada sisa panjar biaya perkara. Untuk itu dimohon kehadiran saudara di PTSP Kasir Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul pada hari dan jam kerja untuk mengambil sisa panjar perkara Gugatan atas nama saudara tersebut.

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa biaya perkara Gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan kami setor ke kas negara.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadikan perkara.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA


KASPENDI SEMBIRING, S.H
NIP. 19680221 199603 1 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul Sebagai laporan



**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGAWASAN DAERAH**

Nomor **TAPM.F.TC.03-05**

Revisi **01**

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMENT (LKA)

Tanggal **05-09-2017**

Jalan Prof.Dr.Wirjono Projoedikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo,
Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187

Halaman **3 of 5**

Berdasarkan Laporan Assessment

**LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA)
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

LOKASI PROSES

Kepaniteraan

**No.
LKA**

01

STANDARD

Indonesia
Court
Performance
Excellence

Kriteria

2,3,4,5,6 dan 7

KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :

Terdapat uang titipan pihak ketiga dengan jumlah Rp. 195.774.700,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) belum tersampaikan kepada penerima dan/ atau ahli warisnya.

KATEGORI

Major Minor

**Temuan diselesaikan
sebelum tanggal**

ASSESSOR

AS, FS, JMN, S

-

Diisi Oleh Pengadilan

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

Penerima uang titipan pihak ketiga sudah meninggal dunia sedangkan ahli warisnya banyak dan tidak diketahui alamat ataupun tempat tinggalnya.

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

Akan disosialisasikan kepada masyarakat luas baik di website atau media social Pengadilan Negeri Bantul terkait uang titipan pihak ketiga tersebut. Selain itu selalu dilaporkan dalam laporan keuangan setiap ada perubahan/ progresnya.

TINDAKAN PENCEGAHAN

Dilakukan sosialisasi secara optimal terkait informasi uang titipan pihak ketiga tersebut dan pemahaman mendalam bagi petugas melalui rapat pembinaan.

**VERIFIKASI TINDAKAN
PERBAIKAN**

TANGGAL

5 Desember 2022

**PERWAKILAN
PENGADILAN**

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

4. Surat Titipan Pihak Ketiga



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, SH No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp./Faks: 0274 - 367344 Laman: www.pn-bantul.go.id
Email: surat@pn-bantul.go.id

B E R I T A A C A R A NOMOR: 01/PDT.KONS/2010/PN.Btl.

Pada hari ini, Senin, Tanggal: 19 Desember 2022, Saya: Kaspendi Sembiring, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bantul disertai dua orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya:

1. Agus Nur Isriyadi, SH
2. Suradal

Keduanya adalah Pegawai Pengadilan Negeri Bantul

Untuk memenuhi permintaan BAMBANG SUPRIYANTO, B.E., Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah dan DIY Jalan Slamet No. 1 Candi Baru, Semarang, sebagai Pemohon Konsignasi.

TELAH MENYERAHKAN KEPADA:

Agus Subekti, Alamat Ngipik Rt. 01, Baturetno, Banguntapan, Bantul (Nomor Kode 20-21) Dimana saya sebagai Panitera hendak menyerahkan uang kompensasi SUTT sebesar Rp. 1.687.500,- (Satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Atas pertanyaan ini apakah Termohon menerima atau menolak Konsignasi tersebut. Termohon Konsignasi memberi jawaban sebagai berikut:

Bahwa saya sebagai Termohon Konsignasi menerima/mentolak penyerahan uang kompensasi SUTT tersebut sebesar Rp. 1.687.500,- (Satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) maka saya Panitera Pengadilan Negeri Bantul dihadapan saksi-saksi tersebut diatas membuat Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, saksi-saksi dan Termohon konsignasi

PANITERA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KASPENDI SEMBIRING, SH

TERMOHON KONSIGNASI

AGUS SUBEKTI

SAKSI - SAKSI

1. AGUS NUR ISRIYADI, SH

2. SURADAL

KWITANSI

Telah terima uang dari: Panitera Pengadilan Negeri Bantul

Uang Sebanyak : satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Guna : Pembayaran Kompensasi SUTT Perkara Perdata Nomor :
01 / Pdt.Kons / 2010 / PN.Btl.

Bantul, 19 Desember 2022
Yang Menerima,

METELAF -
TEMPIL
(Agus Nur Isriyadi)
Termohon

Rp. 1.687.500,-

	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA PENGAWASAN DAERAH	Nomor	TAPM.F.TC.03-05
		Revisi	01
	LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMEN (LKA) Jalan Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo, Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187	Tanggal	05-09-2017
		Halaman	3 of 5

Berdasarkan Laporan Assessment	LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA) PENGADILAN NEGERI BANTUL			
	LOKASI PROSES	Kesekretariatan	No. LKA	01
	STANDARD	Indonesia Court Performance Excellence	Kriteria	2,3,4,5,6 dan 7
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE : Terdapat beberapa pegawai antara lain, a.n Prasetyo Sujadi, S.H dan Suyati belum membuat SKP Tahun 2021 dan atau tidak diupload di SIKEP			
	KATEGORI	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor		Temuan diselesaikan sebelum tanggal
	ASSESSOR	AS, FS, JMN, S		-
Diisi Oleh Pengadilan	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE : 1. SKP yang belum diupload pada SIKEP Tahun 2021 BUKAN a.n Prasetyo Sujadi, S.H melainkan a.n Prasetyo, S.T 2. Di Pengadilan Negeri Bantul tidak ada pegawai a.n Suyati 3. Pegawai a.n Prasetyo,S.T adalah pegawai pindahan dari Pengadilan Negeri Wonosari yang belum dibuatkan SKP dari PN sebelumnya			
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN			
	Menanyakan ke satker asal dan segera mengupload dokumen SKP tersebut			
	TINDAKAN PENCEGAHAN			
	Koordinasi dengan Satker asal setiap ada pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul			
	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	5 Desember 2022	
PERWAKILAN PENGADILAN		Ketua Pengadilan Negeri Bantul		

SKP TAHUN 2021

SKP PRASETYA SUJADI, S.H (SUDAH LENGKAP)

NO	TAHUN SKP	NILAI KONEKLAR PELAKSANA	PEJABAT PENILAI	ALASAN PEJABAT PENILAI	STATUS WILEJAH	Aksi
1	2021	88.00	RUDY SAFARI, S.H. M.H.	AMNUDDIN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
2	2021	88.50	RUDY SAFARI, S.H. M.H.	AMNUDDIN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
3	2020	87.84	RUDY SAFARI, S.H. M.H.	ALHAFIDHUL BUKHARI, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
4	2019	89.84	RUDY SAFARI, S.H. M.H.	ALHAFIDHUL BUKHARI, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
5	2018	81.14	NANKHAELIAN SRI UTAMI, S.H.	ZULFAHRIANUAR, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
6	2017	82.77	KIBWANTANA, S.H.	TRI MANDIYO, S.H. M.Hum.	Selesai	[icon]
7	2016	82.42	KIBWANTANA, S.H.	TRI MANDIYO, S.H. M.Hum.	Selesai	[icon]

SKP PRASETYO, S.T (SKP 2021 SEDANG DALAM PROSES)

NO	TAHUN SKP	NILAI KONEKLAR PELAKSANA	PEJABAT PENILAI	ALASAN PEJABAT PENILAI	STATUS WILEJAH	Aksi
1	2021	85.05	SURARLAN, S.H.	EMAN SULAEBAN, S.H.	Selesai	[icon]
2	2019	86.95	SURARLAN, S.H.	EMAN SULAEBAN, S.H.	Selesai	[icon]
3	2018	88.12	JUNI BUDI UTAM, S.H.	TASMAN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
4	2017	85.63	JUNI BUDI UTAM, S.H.	TASMAN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
5	2016	87.04	JUNI BUDI UTAM, S.H.	TASMAN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
6	2015	85.40	ANTHONGSH, S.H.	SUTOTO, S.H.	Selesai	[icon]
7	2014	88.40	SURARLAN, S.H.	TASMAN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]

SKP PRASETYO, S.T (SUDAH LENGKAP)

NO	TAHUN SKP	NILAI KONEKLAR PELAKSANA	PEJABAT PENILAI	ALASAN PEJABAT PENILAI	STATUS WILEJAH	Aksi
1	2021	87.96	YUYUN RITHQYAH, SE. A.M.	AMNUDDIN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
2	2021	89.00	NUR YUSUF RAHAN, S.T.	EMAN SULAEBAN, S.H.	Selesai	[icon]
3	2020	88.05	SURARLAN, S.H.	EMAN SULAEBAN, S.H.	Selesai	[icon]
4	2019	86.68	SURARLAN, S.H.	EMAN SULAEBAN, S.H.	Selesai	[icon]
5	2018	86.12	JUNI BUDI UTAM, S.H.	TASMAN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
6	2017	85.63	JUNI BUDI UTAM, S.H.	TASMAN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]
7	2016	87.04	JUNI BUDI UTAM, S.H.	TASMAN, S.H. M.H.	Selesai	[icon]



**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGAWASAN DAERAH**

Nomor **TAPM.F.TC.03-05**

Revisi **01**

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMENT (LKA)

Tanggal **05-09-2017**

Jalan Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo,
Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187

Halaman **3 of 5**

erdasarkan Laporan Assessment	LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA) PENGADILAN NEGERI BANTUL		
	LOKASI PROSES	Kesekretariatan	No. LKA 01
	STANDARD	Indonesia Court Performance Excellence	Kriteria 2,3,4,5,6 dan 7
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :		
	Berdasarkan uji petik 2 berkas pensiun a.n MARKINEM dan ISTIKA ARDININGSIH bahwa pengajuan usul pensiun dilakukan kurang dari 1 tahun		
	KATEGORI	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor	Temuan diselesaikan sebelum tanggal
ASSESSOR	AS, FS, JMN, S	-	
Diisi Oleh Pengadilan	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :		
	Pengajuan usul pensiun yang bersangkutan menunggu sosialisasi dari Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Yogyakarta		
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN		
	SK yang bersangkutan tidak terlambat (sebelum TMT Pensiun sudah diterima Pengadilan Negeri Bantul dan yang bersangkutan juga sudah menerima SK		
	TINDAKAN PENCEGAHAN		
	Mengikuti aturan yang berlaku mengenai pengajuan usul pensiun		
	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL 5 Desember 2022	
	PERWAKILAN PENGADILAN Ketua Pengadilan Negeri Bantul		



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR: 00205/13001/AZ/03/21
TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUNSI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

- Menimbang :** Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- Memperhatikan :** Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-13001/000005 Tanggal 15 Januari 2021
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan KESATU :**
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepudanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUNSI

1.	NAMA	FATIM SA'ADAH
2.	NIP	196308171990032003
3.	TANGGAL LAHIR	17 AGUSTUS 1963
4.	JABATAN	JURUSITA PENGGANTI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PENGADILAN NEGERI BANTUL
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAIMA BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 TAHUN 5 BULAN
8.	GAJI POKOK	1AMA Rp4.375.600
9.	MASA KERJA PENSUNSI	BARU Rp4.508.600
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	31 TAHUN 6 BULAN
11.	PENSUNSI TMT	AGUSTUS 2021
12.	PENSUNSI POKOK	1 SEPTEMBER 2021
		Rp3.387.600

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI/SUAMI		KETERANGAN	
NO	NAMA	TGL LAHIR	Nikah Tgl : 25-12-1987
1	JANGKUNG ARIWOWO	10-09-1963	
2. ANAK		KET	
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/Suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp4.508.600 : 1 = Rp1.623.096 (dibulatkan) = Rp1.632.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA :** Datas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
NENGAHAN DK NGIRENG-IRENG RT. 04, PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL



Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 15 Maret 2021
 SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantul;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Yogyakarta;
4. Satuan Kerja terkait.



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 00693/13001/AZ/08/22

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUNSI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-13001000067 Tanggal 7 Juni 2022
- Menetapkan : MEMUTUSKAN:
- RESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUNSI

1.	NAMA	ISTIKA ARDININGSIH
2.	NIP	196412131985022001
3.	TANGGAL LAHIR	13 DESEMBER 1964
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI HUKUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PENGADILAN NEGERI BANTUL
6.	PANGKAT/GOL. RUANG BARU	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I (III/b) / 01-04-2004 BARU PENATA (III/c) / 01-12-2022
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK BARU	LAMA Rp4.415.600 BARU Rp4.602.400
9.	MASA KERJA PENSUNSI	37 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2022
11.	PENSUNSI TMT	1 JANUARI 2023
12.	PENSUNSI POKOK	Rp3.451.800

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTRI/SUAMI		KETERANGAN	
NO	NAMA	TGL LAHIR	Nikah Tgl : 20-04-2018
1	SUMARLAN	17-09-1963	
2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
			KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp4.602.400 : 1 = Rp1.656.864 (dibulatkan) = Rp1.656.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

PERUM KARANGJATI RT.011 RW.000 BANGUNJIWO, KASHIHAN, KAB. BANJUL, PROV. D.I.YOGYAKARTA



Tembusan:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Yogyakarta;
- Satuan Kerja terkait.



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 00693/13001/AZ/08/22

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUNSI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

- Menimbang :** Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.
- Memperhatikan :** Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-13001000067 Tanggal 7 Juni 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUNSI

1.	NAMA	ISTIKA ARDININGSIH
2.	NIP	196412131985022001
3.	TANGGAL LAHIR	13 DESEMBER 1964
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI HUKUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PENGADILAN NEGERI BANTUL
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA
		BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp4.415.600
		BARU
9.	MASA KERJA PENSUNSI	37 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2022
11.	PENSUNSI TMT	1 JANUARI 2023
12.	PENSUNSI POKOK	Rp3.451.800

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTRI/SUAMI		KETERANGAN	
NO	NAMA	TGL LAHIR	Nikah Tgl: 20-04-2018
1	SUMARLAN	17-09-1963	
2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	MAMA AYAH/IBU
			KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp4.602.400 : 1 = Rp1.656.864 (dibulatkan) = Rp1.656.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

PERUM KARANGIATI RT.011 RW.000 BANGUNJIWO, KASIHAN, KAB. BANTUL, PROV. D.I.YOGYAKARTA



Dito: di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanaan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Yogyakarta;
4. Satuan Kerja terkait.

	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA PENGAWASAN DAERAH	Nomor	TAPM.F.TC.03-05	
		Revisi	01	
	LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMEN (LKA)		Tanggal	05-09-2017
	Jalan Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo, Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187		Halaman	3 of 5

Berdasarkan Laporan Assessment	LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA) PENGADILAN NEGERI BANTUL			
	LOKASI PROSES	Kesekretariatan	No. LKA	01
	STANDARD	Indonesia Court Performance Excellence	Kriteria	2,3,4,5,6 dan 7
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :			
	Sebagian koleksi buku lama di perpustakaan belum ditempel label			
	KATEGORI	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor		Temuan diselesaikan sebelum tanggal
	ASSESSOR	AS, FS, JMN, S		-
Diisi Oleh Pengadilan	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN			
	Adanya koleksi lama buku-buku di perpustakaan yang masih menggunakan labelisasi manual, sehingga labelnya sudah pudar.			
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN			
	Pelabelan pada buku-buku di perpustakaan sudah menggunakan label dari aplikasi perpustakaan			
	TINDAKAN PENCEGAHAN			
	Untuk buku-buku yang baru langsung dilabelisasi melalui aplikasi perpustakaan			
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	5 Desember 2022		
	PERWAKILAN PENGADILAN	Ketua Pengadilan Negeri Bantul		

**EVIDENCE
LABEL BUKU PERPUSTAKAAN**



yurisprudensi
Indonesia tentang
sewa menyewa
rumah

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
XVIII/CHID/S

PERKARA KEPAULITAN DALAM PUTUSAN KASASI

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
XVIII/MARI/Y

HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN
SEMESTER II JILID I PERDATA DAN

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
XVIII/PBPU/A

USA

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
XVIII/DEKE/H

HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM
PERKARA PERDAT

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
XVIII/MARI/Y

USA

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
XVIII/DEKE/H

HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN
JILID I PIDANA DAN ACARA

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
XVIII/PUTN/H


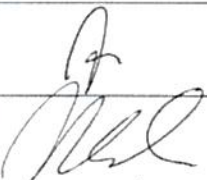
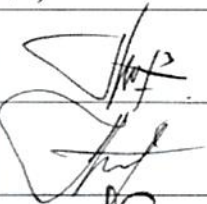
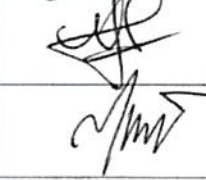

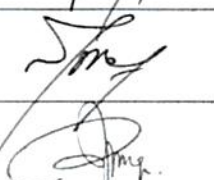
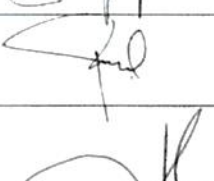

PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL

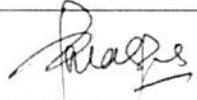



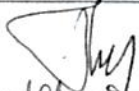
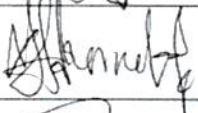

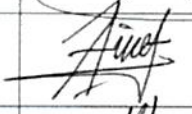


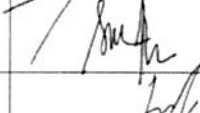

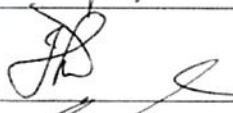
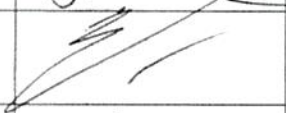
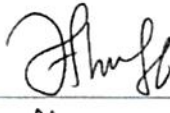


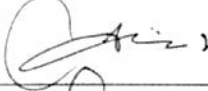
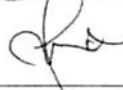

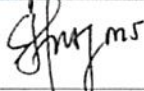
	PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB	Nomor	TAPM.F. AM.05	
		Revisi	1	
	DAFTAR HADIR		Tanggal	14-06-2022
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712		Halaman	1 of 9




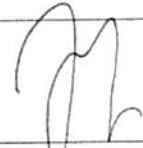


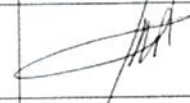





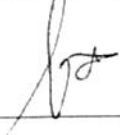


TANGGAL : Rabu, 26 Oktober 2022

TEMPAT : Ruang Sidang Utama

AGENDA : PENGAWASAN DAERAH

NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003	IV/c	Ketua	
2	KURNIWAN WJONARKO, S.H.M.Hum NIP. 197512202001121002	IV/b	Wakil Ketua	
3	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003	IV/a	Hakim	
4	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum NIP. 197805182002122001	IV/a	Hakim	
5	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 198102082005022003	IV/a	Hakim	
6	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 198203072007041001	III/d	Hakim	
7	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. NIP. 198406232007042001	III/d	Hakim	
8	GATOT RAHARJO, S.H.,M.H NIP.198308282009041006	III/d	Hakim	
9	KASPENDI SEMBIRING, S.H NIP. 196802211996031001	IV/a	Panitera	Cuti
10	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001	IV/a	Sekretaris	
11	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Hukum	
12	YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004	III/d	Panitera Muda Pidana	
13	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003	III/c	Panitera Muda Perdata	
14	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007	III/d	Kasubbag. PTIP	
15	PRASETYO, S.T NIP. 198611242011011005	III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
16	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001	III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	

17.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP. 196602231990032004	III/d	Panitera Pengganti	
18.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	
19.	AANG PRABOWO, S.H. NIP. 198308102009041003	III/d	Panitera Pengganti	
20.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP. 198110102009041005	III/d	Panitera Pengganti	
21.	DIAH PRAVITASIWI, S.H. NIP. 198510242009042005	III/d	Panitera Pengganti	Cuti sakit
22.	ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H NIP. 197910282009042002	III/d	Panitera Pengganti	
23.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H NIP. 198210092006042003	III/d	Panitera Pengganti	
24.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001	III/d	Panitera Pengganti	
25.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H NIP. 198410242009121003	III/d	Panitera Pengganti	
26.	HENDRI WIJAYA, S.H NIP.198101302009121001	III/d	Panitera Pengganti	
27.	SUDILAH, S.H. NIP. 197006121990032001	III/c	Panitera Pengganti	
28.	NURUSSOBAN, S.H., M.H. NIP. 197608072011012005	III/c	Panitera Pengganti	
29.	RIMBANG KRISDIANTO, S.H. NIP. 198212192006041002	III/c	Panitera Pengganti	
30.	ANJAR DWIYANTO, S.H NIP.196912042007011002	III/b	Panitera Pengganti	
31.	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H NIP. 198705262014032002	III/b	Panitera Pengganti	
32.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H NIP. 198007282009122001	III/b	Panitera Pengganti	
33.	SURADAL NIP. 197203171993031003	III/b	Juru Sita	
34.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H. NIP. 197011231990031003	III/d	Juru Sita	
35.	CAHYA MULYANTO, S.H NIP. 198507152009121007	III/b	Juru Sita	
36.	PRASETYA SUJADI, S.H. NIP. 197905152006041005	III/c	Juru Sita	
37.	IKA HEPSYAWATI, S.E. NIP. 198506262009122004	III/d	Juru Sita Pengganti	
38.	SUYATINI NIP. 196606191988032001	III/b	Juru Sita Pengganti	

39.	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006	III/b	Juru Sita Pengganti	
40.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 198608152009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN/Bendahara Pengeluaran	
41.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP.198701252009122002	III/a	Pranata Keuangan APBN/Bendahara Penerimaan	
42.	SATRIA PINANDITA, S.E. NIP. 198802282011011004	III/c	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	
43.	ASIANI LAKOBI, S.E.S.H NIP. 198808222009122001	III/c	Analisis SDM Aparatur	Cuti
44.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001	III/b	Pengadministrasi Hukum	
45.	YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 198303252009121005	III/b	Juru Sita Pengganti	
46.	MOHAMMAD JAZURI NIP. 197007272012121003	II/a	Juru Sita Pengganti	
47.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP. 199607042020122006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
48.	RENY WIJAYANTI, S.H NIP.199205182022032006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
49.	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I NIP. 199207202022032007	III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
50.	BASKARA NABLA PUTRA, S.H NIP. 199105182022031004	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
51.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	III/a	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
52.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. NIP. 199805112020122004	II/c	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
53.	NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md NIP.199701112022032012	II/c	Pengelola Barang Milik Negera	
54.	ZAHRATUSHALIHAH, A.Md.M NIP.199708292022032014	II/c	Pengelola Perkara	

Bantul, 26 Oktober 2022
Mengetahui
Ketua
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB


AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP 196509031992031003

**Dokumentasi
Pengawasan Daerah
26 s.d 27 Oktober 2022**





